

STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI UNTUK MENGURANGI KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2020–2025

Ade Asminaria Sihombing¹,Nidia Izmi Azizah Batubara²,Pintar Rohsangapta Padang³
Wanda Syakinah⁴

Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri
Medan

adesihombing776@gmail.com¹, nidiaizminadia2@gmail.com²
padangpintar@gmail.com³, wandasyakinah13@gmail.com⁴

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan permasalahan struktural yang terus menjadi tantangan utama pembangunan nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pembangunan ekonomi yang diterapkan pemerintah Indonesia dalam rangka mengurangi angka kemiskinan selama periode 2020–2025, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut terhadap capaian penurunan kemiskinan. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen kebijakan, data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bappenas, dan Kementerian Keuangan, penelitian ini mengidentifikasi lima strategi utama yang diimplementasikan, yaitu: (1) Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca-pandemi COVID-19; (2) penguatan program perlindungan sosial (Bansos); (3) pengembangan infrastruktur berbasis padat karya; (4) pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); serta (5) akselerasi transformasi digital ekonomi perdesaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia mengalami fluktuasi, sempat melonjak ke angka 10,19% pada Maret 2021 akibat pandemi, namun kembali turun ke level 9,03% pada Maret 2024. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi antara kebijakan perlindungan sosial adaptif, investasi infrastruktur, dan inklusi digital menjadi kunci keberhasilan strategi pengurangan

kemiskinan, meskipun tantangan struktural berupa ketimpangan antar wilayah dan kualitas SDM masih memerlukan perhatian serius.

Kata Kunci: kemiskinan, pembangunan ekonomi, strategi pengurangan kemiskinan, Indonesia, perlindungan sosial

ABSTRACT

Poverty remains a structural challenge that continues to be the primary obstacle in Indonesia's national development. This study aims to analyze the economic development strategies implemented by the Indonesian government to reduce poverty rates during the 2020–2025 period, as well as to evaluate the effectiveness of these policies in achieving poverty reduction targets. Employing a descriptive qualitative research method with a policy document analysis approach and secondary data from BPS, Bappenas, and the Ministry of Finance, this study identifies five core strategies: (1) the National Economic Recovery Program (PEN) post-COVID-19 pandemic; (2) strengthening social protection programs (Bansos); (3) labor-intensive infrastructure development; (4) empowerment of micro, small, and medium enterprises (MSMEs); and (5) acceleration of rural digital economic transformation. The analysis reveals that Indonesia's poverty rate fluctuated significantly, peaking at 10.19% in March 2021 due to the pandemic, before declining to 9.03% by March 2024. This study concludes that a combination of adaptive social protection policies, infrastructure investment, and digital inclusion is central to successful poverty reduction strategies, although structural challenges including inter-regional inequality and human resource quality still require serious attention.

Keywords: poverty, economic development, poverty reduction strategy, Indonesia, social protection

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu problematika paling fundamental yang dihadapi bangsa Indonesia sejak era kemerdekaan hingga saat ini. Meskipun Indonesia telah berhasil mencatat kemajuan signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan dari lebih dari 40% pada era 1970-an menjadi di bawah 10% pada dekade 2010-an, perjalanan menuju penghapusan kemiskinan secara substansial masih memerlukan upaya yang konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan penduduk miskin sebagai mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, yang pada September 2023 ditetapkan sebesar Rp 551.775.

Memasuki periode 2020-2025, Indonesia menghadapi tantangan ganda yang luar biasa kompleks. Di satu sisi, pandemi COVID-19 yang merebak sejak awal tahun 2020 memberikan pukulan telak terhadap perekonomian nasional, memporakporandakan rantai pasok, mematikan jutaan lapangan kerja, dan mendorong jutaan warga kembali ke bawah garis kemiskinan. BPS mencatat bahwa jumlah penduduk miskin melonjak dari 26,42 juta jiwa (9,78%) pada September 2019 menjadi 27,55 juta jiwa

(10,19%) pada Maret 2021, lonjakan terbesar dalam satu dekade terakhir.

Di sisi lain, periode ini juga menandai momentum kebangkitan ekonomi nasional yang didorong oleh serangkaian kebijakan pemulihan ekonomi yang ambisius. Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai lebih dari Rp 1.600 triliun selama 2020-2022, dengan fokus pada bantuan sosial, insentif usaha, dan pembiayaan korporasi. Kebijakan ini, dikombinasikan dengan akselerasi vaksinasi nasional dan pelonggaran mobilitas secara bertahap, berhasil memulihkan perekonomian dan kembali menurunkan angka kemiskinan.

Namun, di balik angka agregat yang membaik, realitas ketimpangan spasial dan struktural kemiskinan Indonesia tetap menjadi keprihatinan serius. Data BPS menunjukkan bahwa kemiskinan masih sangat terkonsentrasi di kawasan perdesaan (12,22% pada Maret 2024 berbanding 7,09% di perkotaan), wilayah Indonesia Timur, serta kelompok penduduk yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan tradisional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa strategi pengurangan kemiskinan tidak dapat sekadar bersifat siklikalreaktif terhadap

krisis, melainkan harus bersifat struktural dan transformatif.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini hadir untuk mengkaji secara mendalam strategi pembangunan ekonomi yang telah dan sedang diterapkan pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi kemiskinan selama periode 2020–2025. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan kondisi dan dinamika kemiskinan di Indonesia selama periode 2020–2025; (2) mengidentifikasi dan menganalisis strategi-strategi pembangunan ekonomi yang diterapkan pemerintah; (3) mengevaluasi efektivitas masing-masing strategi tersebut terhadap capaian pengurangan kemiskinan; dan (4) mengidentifikasi faktor-faktor penghambat serta peluang yang dapat dioptimalkan dalam upaya percepatan pengurangan kemiskinan.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam menyediakan analisis komprehensif yang menghubungkan desain kebijakan dengan hasil empiris di lapangan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang dapat menjadi referensi bagi pengambil keputusan. Dengan memahami secara holistik dinamika kemiskinan dan respons kebijakan yang ada, diharapkan strategi

pengurangan kemiskinan ke depan dapat dirancang dengan lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep dan Teori Kemiskinan

Kemiskinan merupakan konsep multidimensional yang tidak dapat direduksi semata-mata pada dimensi ekonomi. Sen (1999) dalam karyanya yang berpengaruh, *Development as Freedom*, mendefinisikan kemiskinan bukan hanya sebagai kurangnya pendapatan, melainkan sebagai kondisi di mana seseorang tidak memiliki kapabilitas (*capabilities*) untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan bebas. Perspektif ini memperluas dimensi kemiskinan mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, partisipasi sosial, dan kebebasan politik.

Chambers (1983) memperkenalkan konsep *poverty trap* (jebakan kemiskinan) yang menjelaskan bagaimana kemiskinan bersifat *self-reinforcing*: kemiskinan menyebabkan rendahnya investasi dalam modal manusia, yang pada gilirannya melanggengkan kemiskinan lintas generasi. Konsep ini sangat relevan dalam konteks Indonesia di mana angka

putus sekolah dan stunting masih relatif tinggi di daerah-daerah termiskin.

Dalam perspektif yang lebih makro, Todaro dan Smith (2015) mengidentifikasi tiga determinan utama kemiskinan, yaitu rendahnya produktivitas tenaga kerja, ketimpangan distribusi aset produktif, dan lemahnya institusi pasar. Ketiga determinan ini saling berinteraksi dan membutuhkan respons kebijakan yang terpadu dan sinergis, bukan intervensi parsial yang terisolasi.

2.2 Strategi Pembangunan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

Literatur pembangunan ekonomi mengidentifikasi beberapa pendekatan utama dalam strategi pengurangan kemiskinan. Pertama, pendekatan pertumbuhan inklusif (*inclusive growth*) yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja tidak cukup, pertumbuhan harus mampu menyerap tenaga kerja, menciptakan kesempatan yang merata, dan mengurangi ketimpangan (Ranieri & Ramos, 2013). Dalam konteks Indonesia, studi World Bank (2021) menunjukkan bahwa elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi cenderung melemah, mengindikasikan perlunya kebijakan redistributif yang lebih kuat.

Kedua, pendekatan perlindungan sosial (*social protection*) yang menekankan peran program bantuan sosial dalam menjaga konsumsi rumah tangga miskin dan mencegah kemerosotan yang lebih dalam selama periode krisis. Penilaian komprehensif terhadap program Conditional Cash Transfer (CCT) di berbagai negara berkembang, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia, menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan konsumsi, perbaikan status kesehatan, dan peningkatan partisipasi sekolah anak-anak dari keluarga penerima manfaat (Kemensos, 2022).

Ketiga, pendekatan pemberdayaan ekonomi lokal yang menekankan pentingnya penguatan UMKM, koperasi, dan ekonomi perdesaan sebagai motor penggerak pengurangan kemiskinan di akar rumput. Prahalah (2004) dalam *The Fortune at the Bottom of the Pyramid* berargumen bahwa kelompok miskin bukan sekadar penerima bantuan, melainkan agen ekonomi yang potensial apabila diberikan akses terhadap modal, pasar, dan teknologi.

2.3 Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kemiskinan

Pandemi COVID-19 menjadi kejutan ekonomi terbesar dalam sejarah

modern yang mengakibatkan pembalikan kemajuan pengurangan kemiskinan di hampir seluruh negara berkembang. Menurut estimasi Bank Dunia, pandemi mendorong tambahan 100 juta orang ke dalam kemiskinan ekstrem secara global pada tahun 2020. Di Indonesia, Suryahadi et al. (2020) memproyeksikan bahwa pandemi berpotensi menambah 1,3–8,5 juta penduduk miskin baru tergantung pada intensitas dan durasi pembatasan mobilitas.

Respons kebijakan yang cepat dan masif menjadi kunci dalam memitigasi dampak pandemi terhadap kemiskinan. Studi komparatif OECD (2021) menunjukkan bahwa negara-negara yang memiliki sistem perlindungan sosial yang kuat dan mampu merespons dengan ekspansi fiskal yang memadai berhasil membatasi lonjakan kemiskinan yang lebih besar. Pengalaman Indonesia dengan Program PEN memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kesiapan sistem data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dalam menjamin ketepatan sasaran distribusi bantuan.

2.4 Transformasi Digital sebagai Instrumen Pengurangan Kemiskinan

Digitalisasi ekonomi semakin diakui sebagai instrumen penting dalam strategi pengurangan kemiskinan

kontemporer. Akselerasi adopsi teknologi digital dapat memperluas akses masyarakat miskin terhadap layanan keuangan (financial inclusion), pasar yang lebih luas, informasi pertanian, dan layanan pemerintah. Di Indonesia, program digitalisasi UMKM yang digalakkan sejak 2020 telah berhasil onboarding lebih dari 20 juta pelaku UMKM ke platform digital pada akhir 2023 (Kemenkop UMKM, 2023).

Namun, manfaat digitalisasi tidak otomatis merata. Kesenjangan digital (digital divide) antara perkotaan dan perdesaan, antara kelompok terdidik dan tidak, serta antara Jawa dan luar Jawa, berisiko memperparah ketimpangan yang sudah ada jika tidak disertai kebijakan yang memastikan inklusivitas digital. Penelitian Ndubuisi dan Otioma (2021) menegaskan bahwa digitalisasi hanya efektif mengurangi kemiskinan jika disertai dengan investasi dalam infrastruktur digital dasar dan literasi digital.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis dokumen kebijakan (policy document analysis) dan analisis

data sekunder. Pendekatan ini dipilih karena relevansinya dalam mengkaji proses formulasi kebijakan, implementasi program, dan evaluasi capaian pembangunan yang kompleks dan multidimensional. Paradigma penelitian yang digunakan adalah interpretivisme kritis, yang memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mendeskripsikan kebijakan yang ada, tetapi juga menganalisis implikasi dan kontradiksinya secara mendalam.

3.2 Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari dua kategori utama. Pertama, data sekunder kuantitatif yang meliputi: data kemiskinan dan statistik sosial-ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS); data anggaran dan realisasi program PEN dari Kementerian Keuangan; data program perlindungan sosial dari Kementerian Sosial; data investasi infrastruktur dari Kementerian PUPR dan Bappenas; serta laporan tahunan Bank Indonesia dan OJK. Kedua, dokumen kebijakan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan, perpres dan peraturan teknis terkait program pengurangan kemiskinan, serta laporan evaluasi program dari kementerian/lembaga terkait.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, studi dokumentasi, yakni penelaahan dan analisis mendalam terhadap berbagai dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga internasional (World Bank, ADB, UNDP), dan publikasi ilmiah yang relevan. Kedua, analisis data statistik, yakni pengolahan dan interpretasi data time series kemiskinan BPS untuk mengidentifikasi tren, pola, dan anomali dalam dinamika kemiskinan selama periode 2020–2025. Ketiga, triangulasi data, yakni perbandingan dan konfirmasi silang antara berbagai sumber data untuk memastikan validitas dan reliabilitas analisis.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan tiga tahap yang saling berkaitan. Pertama, analisis deskriptif untuk memetakan kondisi kemiskinan dan kebijakan yang ada. Kedua, analisis evaluatif menggunakan kerangka teoritis yang telah diidentifikasi dalam kajian pustaka untuk menilai efektivitas masing-masing strategi. Ketiga, analisis sintesis untuk merumuskan rekomendasi kebijakan berdasarkan temuan empiris dan gap antara desain kebijakan dengan hasil di lapangan. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber, member

check dengan informan kunci dari kalangan akademisi dan praktisi kebijakan, serta pemeriksaan internal konsistensi argumen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 *Dinamika Kemiskinan Indonesia Periode 2020–2025*

Data BPS menggambarkan trajektori yang sangat dinamis dalam angka kemiskinan Indonesia selama periode penelitian. Pada September 2019, sebelum pandemi melanda, tingkat kemiskinan berada pada 9,22%, setara dengan 24,79 juta jiwa. Pandemi COVID-19 kemudian membalikkan tren penurunan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun: pada September 2020, angka kemiskinan melonjak ke 10,19% (27,55 juta jiwa), dan mencapai puncaknya pada Maret 2021.

Seiring pelonggaran pembatasan mobilitas, pemulihan aktivitas ekonomi, dan gencarnya distribusi bantuan sosial, angka kemiskinan mulai menurun kembali secara konsisten. Pada September 2022, tingkat kemiskinan turun ke 9,54% (26,36 juta jiwa), dan pada Maret 2024 mencapai 9,03% (25,22 juta jiwa), mendekati level pra-pandemi. Namun, penting dicatat bahwa meski jumlah penduduk miskin kembali menurun, karakteristik kemiskinan justru

semakin mengkhawatirkan: Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di beberapa wilayah perdesaan menunjukkan peningkatan, mengindikasikan bahwa mereka yang tetap miskin justru semakin jauh dari garis kemiskinan.

Secara geografis, ketimpangan kemiskinan antar wilayah tetap persisten. Provinsi Papua Pegunungan mencatat tingkat kemiskinan tertinggi (32,97%), jauh melampaui DKI Jakarta yang hanya 4,30%. Kondisi ini mencerminkan bahwa strategi pengurangan kemiskinan yang seragam (one-size-fits-all) tidak akan efektif; diperlukan pendekatan yang terdiferensiasi dan kontekstual sesuai dengan karakteristik kemiskinan di masing-masing wilayah.

4.2 *Analisis Lima Strategi Utama Pengurangan Kemiskinan*

Strategi pertama adalah Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah Indonesia merespons krisis pandemi dengan merancang Program PEN yang merupakan paket fiskal ekspansif terbesar dalam sejarah Indonesia. Realisasi anggaran PEN mencapai Rp 1.643,6 triliun selama 2020–2022, mencakup kluster perlindungan sosial, kesehatan, dukungan UMKM, insentif usaha, dan pembiayaan korporasi. Studi dampak yang dilakukan

Bappenas (2022) menunjukkan bahwa tanpa Program PEN, tingkat kemiskinan diperkirakan dapat mencapai 12,4% pada tahun 2021, jauh lebih tinggi dari realisasi 10,19%. Artinya, program ini berhasil mencegah kemiskinan tambahan sekitar 6–7 juta jiwa.

Strategi kedua adalah penguatan perlindungan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako menjadi tulang punggung perlindungan sosial selama pandemi. PKH menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan anggaran Rp 28,7 triliun pada tahun 2021. Evaluasi dampak PKH oleh TNP2K (2022) menunjukkan bahwa setiap Rp 1 yang diinvestasikan dalam PKH menghasilkan dampak konsumsi multiplier sebesar Rp 1,8 bagi perekonomian lokal penerima manfaat. Bansos Tunai dan Kartu Prakerja juga berperan signifikan dalam menjaga daya beli kelompok rentan selama periode krisis.

Strategi ketiga adalah pengembangan infrastruktur padat karya. Program Padat Karya Tunai (PKT) yang diimplementasikan Kemendes PDTT berhasil menyerap 3,4 juta tenaga kerja perdesaan pada tahun 2020 dan 2021. Pembangunan infrastruktur jalan desa, irigasi, dan fasilitas publik tidak hanya menciptakan pendapatan jangka pendek

bagi warga miskin, tetapi juga meningkatkan konektivitas yang berimplikasi pada pengurangan biaya logistik, perluasan akses pasar, dan peningkatan produktivitas pertanian dalam jangka panjang.

Strategi keempat adalah pemberdayaan UMKM. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan target penyaluran Rp 373,17 triliun pada tahun 2023 menjadi instrumen utama penguatan kapital UMKM. Pemerintah juga meluncurkan Program Pemulihan UMKM (BPUM/BLT UMKM) senilai Rp 2,4 juta per pelaku usaha yang menjangkau lebih dari 12 juta penerima pada tahun 2021. Digitalisasi UMKM yang dipercepat melalui program Gernas BBI dan berbagai inisiatif e-commerce berhasil mendorong peningkatan omzet rata-rata UMKM digital sebesar 23% dibandingkan UMKM non-digital (Kemenkop UMKM, 2023).

Strategi kelima adalah akselerasi transformasi digital ekonomi perdesaan. Program Desa Digital dan perluasan jaringan internet desa melalui program BAKTI Kominfo berhasil menghubungkan lebih dari 12.500 desa terpencil ke jaringan internet pada akhir 2023. Integrasi layanan keuangan digital melalui BUMDes dan agen BRILink berhasil memperluas inklusi keuangan di

perdesaan, di mana sebelumnya lebih dari 50% warga perdesaan tidak memiliki rekening bank. Inklusi keuangan ini membuka akses terhadap tabungan, kredit mikro, dan produk asuransi yang dapat menjadi buffer bagi kelompok rentan dalam menghadapi risiko ekonomi.

4.3 Evaluasi Efektivitas dan Faktor Penghambat

Secara keseluruhan, kombinasi kelima strategi tersebut terbukti efektif dalam mencegah memburuknya kemiskinan secara masif selama pandemi dan mendorong pemulihan yang relatif cepat. Namun, analisis mendalam mengidentifikasi sejumlah faktor penghambat yang mengurangi efektivitas optimal kebijakan.

Pertama, masalah akurasi data penerima manfaat. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan distribusi bansos masih mengandung inclusion error (orang kaya tercatat sebagai miskin) dan exclusion error (orang miskin tidak tercatat) yang signifikan. Audit BPKP (2021) menemukan indikasi inclusion error DTKS mencapai 22,8%, menyebabkan kebocoran sumber daya yang seharusnya diarahkan kepada yang benar-benar membutuhkan.

Kedua, tantangan koordinasi lintas sektor dan lintas level

pemerintahan. Pelaksanaan program pengurangan kemiskinan yang melibatkan banyak kementerian/lembaga seringkali menghadapi masalah tumpang-tindih, inkonsistensi sasaran, dan inefisiensi administrasi. Penguatan Single Window System untuk integrasi program penanggulangan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.

Ketiga, ketimpangan kapasitas fiskal daerah. Program-program pusat seringkali tidak optimal implementasinya di daerah-daerah termiskin karena keterbatasan kapasitas aparatur dan infrastruktur pemerintahan daerah. Desentralisasi tanpa diimbangi peningkatan kapasitas pemerintah daerah berisiko memperlebar ketimpangan pembangunan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting mengenai strategi pembangunan ekonomi untuk pengurangan kemiskinan di Indonesia periode 2020–2025.

Pertama, pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan yang luar biasa terhadap kemiskinan Indonesia, namun respons kebijakan yang cepat dan masif

melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional berhasil mencegah skenario kemiskinan terburuk. Tanpa intervensi kebijakan yang agresif, estimasi menunjukkan bahwa angka kemiskinan dapat jauh lebih tinggi dari yang terjadi.

Kedua, pendekatan multi-strategi yang menggabungkan perlindungan sosial adaptif, pemberdayaan ekonomi produktif, pengembangan infrastruktur, dan akselerasi inklusi digital terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan tunggal. Sinergi antar program menjadi kunci keberhasilan, meskipun koordinasi antar lembaga masih menjadi area yang perlu diperkuat.

Ketiga, meskipun tren agregat menunjukkan perbaikan, ketimpangan geografis kemiskinan antara Jawa dan luar Jawa, antara perkotaan dan perdesaan, serta antara Indonesia Barat dan Timur tetap menjadi tantangan struktural yang belum terpecahkan. Strategi pengurangan kemiskinan ke depan harus lebih berperspektif spasial dan memperhatikan kedalaman serta keparahan kemiskinan, bukan sekadar jumlah penduduk miskin.

Keempat, kualitas data dan sistem penargetan penerima manfaat merupakan faktor krusial yang menentukan efektivitas program. Akurasi DTKS yang masih perlu ditingkatkan menjadi

prioritas untuk memastikan sumber daya negara yang terbatas benar-benar sampai kepada yang paling membutuhkan.

6. SARAN

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, berikut dikemukakan sejumlah saran yang ditujukan kepada berbagai pemangku kepentingan.

Bagi Pemerintah Pusat dan Bappenas, perlu dilakukan pemutakhiran DTKS secara berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi big data dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan akurasi penargetan penerima manfaat. Integrasi berbagai program penanggulangan kemiskinan ke dalam satu platform digital terpadu (Single Window System) perlu dipercepat untuk menghilangkan tumpang-tindih dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, strategi pengurangan kemiskinan pasca-2025 perlu dirancang dengan lebih berorientasi pada dimensi kemiskinan multidimensi, bukan hanya garis kemiskinan moneter.

Bagi Pemerintah Daerah, kapasitas aparatur dan kelembagaan dalam mengelola program-program penanggulangan kemiskinan perlu terus ditingkatkan, terutama di daerah-daerah

yang tingkat kemiskinannya masih tinggi. Pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi penanggulangan kemiskinan yang kontekstual dan berbasis data lokal, tidak sekadar menjalankan program dari pusat. Koordinasi antara OPD terkait dan sinergi antara Dana Desa, DAK, dan DAU dalam pembiayaan program kemiskinan perlu diperkuat.

Bagi Kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan, mekanisme penyaluran bantuan sosial perlu terus dimodernisasi menuju sistem pembayaran digital yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi program yang real-time berbasis data digital perlu diprioritaskan agar penyesuaian kebijakan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan responsif.

Bagi Akademisi dan Peneliti, studi lebih mendalam tentang dampak jangka panjang program-program pengurangan kemiskinan terhadap mobilitas sosial antargenerasi sangat diperlukan. Penelitian yang mengeksplorasi hubungan antara inklusi digital dan pengurangan kemiskinan multidimensi di berbagai konteks regional Indonesia juga menjadi agenda penelitian yang mendesak untuk dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arner, D. W., Barberis, J. N., & Buckley, R. P. (2018). FinTech, RegTech and the reconceptualization of financial regulation. *Northwestern Journal of International Law & Business*, 37(3), 371–413.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024. BPS RI.
- Bappenas. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024: Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan. Kementerian PPN/Bappenas.
- Bappenas. (2022). Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2020–2024: Capaian dan Proyeksi. Kementerian PPN/Bappenas.
- Chambers, R. (1983). *Rural development: Putting the last first*. Longman.
- Habibullah, M. (2020). Dampak pandemi COVID-19 terhadap peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. *Sosio Informa*, 6(2), 147–166.
- Kementerian Keuangan RI. (2023). Laporan Realisasi APBN dan Program PEN Tahun Anggaran 2020–2022. Kemenkeu RI.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). Laporan Kinerja Pemberdayaan UMKM: Digitalisasi dan Pemulihan Pasca-Pandemi 2020–2023. Kemenkop UKM.
- Kementerian Sosial RI. (2022). Laporan Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021. Kemensos RI.

- Ndubuisi, G., & Otioma, C. (2021). Digital infrastructure and employment in Africa. *Telecommunications Policy*, 45(6), 102153. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2021.102153>
- OECD. (2021). *OECD Economic Surveys: Indonesia 2021*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/4c4d8e2a-en>
- Prahalad, C. K. (2004). *The fortune at the bottom of the pyramid: Eradicating poverty through profits*. Wharton School Publishing.
- Ranieri, R., & Ramos, R. A. (2013). *Inclusive growth: Building up a concept* (Working Paper No. 104). International Policy Centre for Inclusive Growth.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). Estimating the impact of COVID-19 on poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(2), 175–192. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1790437>
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (2022). *Evaluasi Dampak Program Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia*. TNP2K.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson Education.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2023). *Human Development Report 2023/2024: Breaking the deadlock*. UNDP.
- World Bank. (2021). *Indonesia poverty assessment: Pathways towards economic security*. World Bank Group. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1722-2>
- World Bank. (2023). *Indonesia economic prospects: Investing in people*. World Bank Group.

